

Selasa, 27 September 2011

Pontianak, BERKAT.

Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas BPK-RI perwakilan Kalbar, Sigit Pratama Yudha, mengatakan hasil sementara pemeriksaan asset Kalbar sudah dikeluarkan dan telah diserahkan kepada Badan Pengelola Asset Pemprov Kalbar, namun pihak BPK-RI perwakilan Provinsi Kalbar belum berani memberikan keterangan lebih lanjut mengenai apa yang temuan permasalahan asset.

"Hal itu masih dalam pembahasan internal pihak BPK-RI," katanya, belum lama ini di ruang kerjanya.

Sigit menjelaskan sejauh ini asset pemprov Kalbar masih sedang dilakukan penyusunan membuat laporan.

"Tim pemeriksa asset Kalbar ini baru pulang dari tugasnya satu hari sebelum hari lebaran. Dan kita belum bisa memberikan keterangan mengenai persoalan asset. Karena masih dalam tahap penyusunan laporan," jelas Sigit.

Ia menambahkan tim pemeriksa asset Kalbar yang diperkirakan sebanyak lima hingga tujuh orang itu masih melakukan penyusunan laporan. Tim tersebut memulai kerjanya dari awal bulan Agustus dan berakhir pada akhir bulan Agustus.

"Kini tim itu telah diisolir dan kini mereka tengah menyelesaikan penyusunan laporan," jelas Sigit.

Pihaknya, berjanji akan mempublikasikan apa yang menjadi temuan di dalam persoalan asset yang ada di Kalbar termasuk persoalan KONI.

Untuk temuan pemeriksaan manajemen aset, saat ini sedang dalam proses penyusunan Konsep Hasil Pemeriksaan (KHP).

Sigit menjelaskan proses pemeriksaan keuangan pemprov Kalbar itu telah sesuai secara mekanisme. Dimana pihak BPK RI menemukan informasi awal adanya kerugian Negara. Lalu, pihak BPK mengembalikan hasil rekomendasi ter-

Audit Asset Sudah Keluar

sebut ke mekanisme masing-masing.

"Jika ada ditemukan kerugian seperti indikasi kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan oleh PNS bendahara, itu akan menjadi lahan BPK untuk melengkapkan. Jika kerugian Negara disebabkan PNS non bendahara, maka kita menyarankan pemerintah untuk menindaklanjutinya ke majelis TPGR. Agar mereka dapat menindaklanjuti dan menetapkan," ungkapnya.

BPK RI tidak memiliki kewenangan untuk di bidang perlengkapan dan kerugian dalam kasus PNS non bendahara. Kembali mengenai proses pengembalian keuangan ke kas Negara, Sigit mengatakan perhitungan 60 hari yang dimaksud itu bukan perkara pengembalian itu harus tuntas dan selesai.

Tapi, adanya pengembalian atau cicilan

itu, pihak BPK RI melakukan pencatatan dan sudah dapat dikatakan ditindaklanjuti meski hal itu dapat dikatakan belum selesai.

Sementara itu anggota DPRD Kalbar, Tony Kurniadi, ST, menyarankan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar segera melakukan inventarisasi dan pendataan terhadap asset sesuai dengan rekomendasi dan audit BPK, dan apabila dalam pelaksanaannya masih didapat persoalan-persoalan yang nantinya berdampak Pemerintah Provinsi sulit untuk mendapatkan penilaian Wajar Tanpa pengecualian (WTP), maka DPRD Provinsi Kalimantan Barat untuk dapat membentuk Pansus Asset sebagai sebuah komitmen bersama agar asset pemerintah Provinsi terdata dan tertata dengan baik secara keseluruhan. (aca)